

BAB II

TIONGKOK SEBAGAI NEGARA PERADABAN DAN *GREAT POWER*

2.1 Tiongkok menuju Negara Bangsa?

Bagaimanakah sebenarnya Tiongkok dapat bangkit menjadi salah satu kekuatan besar di dunia? Ada argumen yang mengatakan bahwa kebangkitan Tiongkok merupakan produk dari negara pada umumnya yang mana mereformasi dirinya sesuai dengan pandangan Barat dengan ekonomi pasarnya sehingga ia dapat menikmati pembangunan yang pesat. Selain itu, dengan penerimaan terhadap model barat, baik secara cepat atau lambat Tiongkok pada akhirnya akan menjadi bagian dari dunia Barat. Argumen lain mengatakan bahwa Tiongkok dapat bangkit karena ia merepresentasikan sebuah bentuk negara yang berbeda dari negara pada umumnya. Tiongkok konsisten dengan jalur perkembangannya sendiri (Zhang, 2012). Pada dasarnya Tiongkok merupakan negara yang bergerak dengan ide dan pemikiran yang otentik dari dirinya sendiri yang mana berbeda dari model Barat. Tiongkok merupakan negara peradaban yang mana merupakan produk dari sejarah yang berkelanjutan.

Beberapa orang berpendapat jika dunia Barat merepresentasikan ide dan gagasan manusia yang unggul dan Tiongkok sudah seharusnya untuk membuat perekonomian, sosial, dan politiknya sesuai dengan ide dan gagasan Barat. Tetapi,

Zhang (2012) berpendapat bahwa ketika Tiongkok mengikuti model dari Barat, Tiongkok justru akan mengalami kekacauan dan kehancuran. Jika memaksa diri untuk mengikuti model dari Barat, Tiongkok justru akan mengalami nasib yang sama dengan Uni Soviet dan Yugoslavia. Tiongkok dengan modelnya sendiri yang berbeda dengan barat dapat mengalami kebangkitan menuju salah satu kekuatan besar dunia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia. Meskipun demikian, bukan berarti Tiongkok dan Barat akan bergerak ke arah persaingan dan konflik. Sebaliknya, mengingat dari tradisi dan budayanya, Tiongkok justru akan menjadi negara yang akan mencari kehidupan berdampingan yang damai, pembelajaran dua arah, dan kompromi dengan negara lain dan sistem politik yang lain. Tetapi, tentu saja hal ini dapat berubah apabila beberapa negara memiliki determinasi untuk melawan Tiongkok.

Untuk memahami sifat dari Negara Peradaban, akan lebih baik untuk melihat kembali pemahaman terhadap konsep Negara Bangsa terlebih dahulu. Perjanjian Westphalia dipercaya sebagai fondasi dari Hubungan Internasional modern sekaligus Negara Bangsa karena pada perjanjian ini konsep mengenai kedaulatan negara, mediasi antar negara, dan diplomasi pertama kali ditemukan (Patton, 2019). Mulai dari perjanjian ini konsep Negara Bangsa berkembang dan menjadi sistem yang dipakai di dalam dunia internasional. Negara Bangsa sendiri dipahami sebagai negara di mana penduduknya memandang diri mereka sebagai suatu bangsa dan merupakan entitas legal yang mempunyai batas-batas teritorial di bawah pemerintahan tunggal yang penduduknya memandang diri mereka saling berkaitan satu sama lain (Mustaqim & Muhammad, 2015). Negara Bangsa adalah

produk sejarah di mana nasionalisme merupakan landasan yang paling kuat. Negara Bangsa, dalam konteks modern, dipakai sebagai istilah untuk menunjuk identitas hampir semua negara yang ada di dunia saat ini.

Sistem Negara Bangsa memiliki dua dimensi, yaitu : (1) dimensi domestik, atau relasi masyarakat di dalam negara dengan satu sama lain dan dengan institusi pemerintahan; dan (2) dimensi internasional, atau relasi antar negara (Brown, 1984). Dimensi domestik merujuk kepada kedaulatan setiap negara dan direpresentasikan oleh satu pemerintahan tunggal yang diakui oleh negara yang lain. Pemerintahan tunggal tersebut bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rakyatnya melalui hukum dan aturan, perekonomian, norma keadilan, kontrol terhadap sumber daya alam, basis budaya umum, terutama bahasa. Dimensi internasional merujuk kepada hubungan internasional yang harus diselenggarakan berdasarkan sistem Negara Bangsa. Artinya setiap negara harus menghargai kedaulatan negara yang lain kecuali sebelumnya sudah mendapatkan izin.

Tiongkok terpaksa bergabung dengan sistem dunia internasional yang didominasi oleh Negara Bangsa pada pertengahan abad ke-19. Kegagalan pada beberapa perang dengan Kekuatan Besar pada saat itu, yang mana memulai Perang Opium pada akhir 1840, membuat Tiongkok menjadi negara yang 'setengah terjajah' dan dibagi oleh beberapa penjajah. Selanjutnya, dengan kehancuran dinasti Qing, Tiongkok terpaksa harus mengalami perang saudara yang mana nantinya berubah menjadi usaha perlawanan terhadap invasi Jepang. Pada masa itu sebenarnya PDB Tiongkok sudah lebih besar dibandingkan dengan Inggris dan Jepang. Masalahnya, Jepang dan Inggris pada saat itu sudah menjadi Negara

Bangsa dengan kekuatan persatuan nasional dan mobilisasi perang yang mana tidak dimiliki oleh Tiongkok. Setelah 100 tahun dari gejolak domestik dan pengalaman terjajah, Tiongkok akhirnya menjadi negara yang independen pada tahun 1949 dan diakui sebagai bagian dari komunitas internasional (Niu, 2012).

Dinasti Qing, pada dekade terakhir periodenya, mencoba untuk mencapai model industrialisasi barat dengan tanpa mengubah sistem politik Tiongkok yang lama. Kebijakannya adalah untuk menerapkan nilai-nilai asli Tiongkok sebagai prinsip fundamental dan nilai-nilai Barat untuk penerapan praktikalnya. Walaupun, dengan jatuhnya dinasti terakhir ini, arah gerak Tiongkok secara total berubah ke arah ideologi modern dari revolusi dan pembangunan Negara Bangsa. Perubahan ini diprakarsai oleh Sun Yat-sen, pendiri dari Partai Komunis dan Republik Tiongkok. Sun Yat-sen memiliki tujuan utama untuk mengubah Tiongkok menjadi Negara Bangsa yang mampu bersaing dengan Kekuaan Besar lainnya (Niu, 2012). Pada masa ini, Tiongkok memulai fondasi awalnya untuk menjadi Negara Bangsa secara utuh. Ray Huang (2015), dalam bukunya yang berjudul *China: A macro history*, memberikan penjelasan mengenai apa yang membuat Tiongkok semakin tegas dengan statusnya sebagai Negara Bangsa. Ia menyebutkan bahwa pada era rezim Kuomintang yang dipimpin oleh Sun Yat-sen berhasil membentuk *upper structure* di Tiongkok dengan mereformasi bentuk pemerintahannya. Selanjutnya, pada masa rezim Komunis yang dipimpin oleh Mao, Tiongkok berhasil membentuk *lower structure*. Usaha Mao untuk mengorganisasi masyarakat kelas akar rumput, reformasi lahan, dan kampanye literasi membentuk landasan awal untuk manajemen ekonomi Tiongkok. Kemudian, pada masa Deng Xiaoping dengan

reformasi ekonomi dan kebijakan pintu terbukanya, Tiongkok berhasil membentuk *middle structure* dengan ekonomi pasar modernnya. Ketiga struktur tersebut mempertegas status Tiongkok sebagai Negara Bangsa di mata komunitas internasional.

Setelah mengalami periode reformasi yang cukup panjang, Tiongkok berhasil meraih kesuksesan di dalam bidang pembangunan ekonominya. Tetapi, di lain sisi berbagai kritik terhadap Tiongkok juga bermunculan. Salah satu kritik terpopulernya adalah Tiongkok sebenarnya belum sukses dalam modernisasi politiknya. Seharusnya demokrasi liberal ala Barat adalah bentuk terakhirnya dan bukan sistem politik yang non-demokratis. Tetapi, yang perlu dipahami adalah Tiongkok, meskipun sudah menjadi Negara Bangsa, tetap tidak bisa disamakan dengan barat, mengingat sejarah panjang yang sudah dialami oleh Tiongkok selama ribuan tahun. Pengalaman sejarah panjang yang dialami oleh Tiongkok telah membentuk identitas kuat yang tidak bisa hilang begitu saja yang mana sifatnya sangat berbeda dari konsep Negara Bangsa (Jacques, 2009) (Zhang, 2012). Faktor ini yang membuat perilaku Tiongkok di kancah internasional sulit untuk dijelaskan.

2.2 Tiongkok sebagai Negara Peradaban

Tiongkok sebenarnya bukan merupakan Negara Bangsa pada umumnya di dalam keluarga bangsa-bangsa, namun merupakan sebuah peradaban yang berpura-pura menjadi sebuah negara (Pye, 1990). Fakta bahwa Tiongkok sebagai sebuah negara didirikan berdasarkan salah satu dari peradaban terbesar di dunia

memberikan banyak sekali kekuatan dan ketahanan terhadap budaya politiknya. Selain itu, Tiongkok yang diidentifikasi sebagai sebuah peradaban ketimbang sebagai sebuah negara juga terdapat diungkapkan oleh Huntington. Ia menyebutkan bahwa konflik di dunia nantinya akan disebabkan oleh permasalahan peradaban yang berbeda di mana Tiongkok merupakan salah satu peradaban tersebut (Huntington, 1993)

Negara Peradaban adalah negara yang sudah memiliki tradisi sejarah dan budaya yang kuat (Zhang, 2012). Tiongkok, jika dibandingkan dengan yang lainnya, merupakan negara yang unik dan berbeda. Tiongkok tidak hanya merupakan suatu Negara Bangsa, tapi juga merupakan sebuah peradaban dan benua. Bahkan, Tiongkok sebagai atau menjadi Negara Bangsa dapat dikatakan relatif baru. Tiongkok baru menjadi Negara Bangsa mungkin pada akhir abad ke 19 atau setelah revolusi 1911 (Jacques, 2009). Tiongkok sebagai Negara Bangsa merupakan suatu kreasi baru. Tetapi, ketika dilihat lebih dalam lagi, Tiongkok sudah ada selama beberapa milenium. Tiongkok sudah ada sejak lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Dengan kata lain, identitas Tiongkok tidak hanya terbatas pada sejak kapan ia menjadi sebuah negara. Tiongkok sebagai Negara Bangsa tidak cukup untuk mendefinisikan identitas Tiongkok secara utuh.

Ketika orang-orang Tiongkok menggunakan istilah “China”, mereka seringkali tidak merujuk kepada Tiongkok sebagai sebuah negara sebanyak yang mereka gunakan untuk merujuk kepada peradaban Tiongkok (Jacques, 2009). Ketika berbicara mengenai peradaban Tiongkok maka sejarah, dinasti, Konfusius, cara berpikir, hubungan dan adat istiadat, *guanxi*, keluarga, bakti, penyembahan

leluhur, nilai-nilai, dan filosofi yang khas juga termasuk di dalamnya. Tiongkok menganggap diri mereka terutama sebagai suatu Negara Peradaban. Identitas ini terdefiniskan dari sejarah yang luar biasa panjang, skala demografi dan geografi, serta keberagaman yang sangat luas. Implikasinya adalah persatuan adalah prioritas utamanya dan pluralitas adalah kondisi dari eksistensinya. Implikasi ini juga yang membuat Tiongkok dapat menawarkan Hongkong “*one country, two systems*” yang mana asing bagi konsep Negara Bangsa.

Pemerintahan Tiongkok sendiri sebenarnya tidak pernah secara langsung mengakui identitas negaranya sebagai Negara Peradaban. Tetapi, jika dilihat dari sejarah dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan, secara tidak langsung pemerintahan Tiongkok mengatakan bahwa Negara Peradaban adalah identitas dari Tiongkok. Berkaca dari sejarah Tiongkok modern, salah satu contohnya adalah Sun Yat-sen menganggap budaya Tiongkok lebih superior dibandingkan barat, tapi ia siap untuk mengenalkan institusi demokratis sebagai bagian dari pemerintahan nasional Tiongkok (Meissner, 2006). Sun Yat-sen pada saat itu berusaha melakukan sintesis terhadap tradisi Konfusian dengan liberalisme politik Barat. Meskipun pada periode 1949 sampai 1978 Tiongkok berusaha menerapkan Marxisme-Leninisme, namun usaha ini tidak membuahkan hasil. Karena pada periode setelahnya, yaitu pada periode Deng Xiaoping, Konfusianisme kembali muncul ke permukaan sebagai prinsip yang menentukan jalan Tiongkok. Tepatnya Konfusianisme kembali muncul kembali pada tahun 1986 di bawah arahan dari Partai Komunis ketika anggota *state council*, Gu Mu, menjadi ketua dari masyarakat Konfusian yang baru saja terbentuk.

Senada juga dengan Xi Jinping, presiden Tiongkok yang menjabat sejak 2013, melalui konsep utamanya mengenai identitas nasional Tiongkok. Konsep utama dari identitas nasional Tiongkok pada era pemerintahan Xi Jinping adalah “*China Dream*”. *China Dream* merupakan konsep identitas nasional yang mengkombinasikan budaya tradisional Tiongkok dan nilai-nilai sosialis (He, 2017). Konfusian Tiongkok memandang bahwa dunia didasarkan kepada hierarki kultural yang mana *Middle Kingdom* merupakan pusat yang beradab dan yang lainnya adalah bawahan dari pusat tersebut. *Middle Kingdom* sendiri merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada Tiongkok sebagai pusat dari dunia, tanah di bawah Surga (*tianxia*), dan superior dibandingkan dengan daerah-daerah disekelilingnya (Jacques, 2009). *Middle Kingdom* mengimplikasikan Tiongkok memiliki perilaku untuk memperluas kekuasaannya (Rosyidin, 2017). Callahan di dalam buku karangan Jacques (2009) menyebutkan terdapat empat narasi berbeda yang berada di dalam peradaban *Middle Kingdom* Tiongkok. Pertama, *zhongguo* yang berarti Tiongkok sebagai negara teritorial yang bersifat ke dalam atau Tiongkok yang berusaha mempertahankan wilayahnya. Kedua, *da zhongguo* yang berarti Tiongkok sebagai penakluk. Ketiga, *da zhongguo* atau Tiongkok bersifat merubah yang mana artinya Tiongkok memandang dirinya superior. Narasi terakhir adalah Tiongkok yang selalu berusaha merepresentasikan Tiongkok yang lebih besar di manapun berada.

Negara Peradaban menerapkan politik yang berbeda jenisnya dengan Negara Bangsa pada umumnya, dengan persatuan yang bersumber dari ide mengenai peradaban dibandingkan dengan Negara Bangsa sebagai prioritas

utamanya (Jacques, 2009). Peradaban normalnya memberikan pengaruh secara tidak langsung karena keberadaannya yang bersifat lembam dan pasif. Tetapi, berbeda kasusnya dengan Tiongkok di mana tidak hanya sejarah yang hidup, tapi peradaban itu sendiri. Gagasan mengenai peradaban yang hidup ini menyediakan identitas utama dan konteks bagi bagaimana Tiongkok melihat negaranya dan bagaimana negara ini mendefinisikan dirinya.

2.2.1 Tradisi dan Budaya

Tiongkok, dengan sejarahnya yang panjang dan berkelanjutan, telah menjadi salah satu negara dengan warisan sejarah terkaya di dunia (Zhang, 2012). Kebudayaan Tiongkok merupakan bentuk sinergi dari berbagai budaya dari “ratusan negara” selama keberjalanan sejarahnya yang panjang. Selain itu, meskipun dengan adanya perbedaan dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi antara daratan utama Tiongkok dengan daerah lainnya di mana budaya Tiongkok mendominasi, masih mungkin untuk mengidentifikasi beberapa nilai-nilai kultural utama yang dianut. Di manapun orang-orang Tiongkok tinggal, entah itu di daratan utama Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, atau yang berada di luar negeri, budaya Tiongkok tetap memberikan dasar identitas bagi mereka (Fan, 2000). Nilai-nilai ini bersifat unik dan konsisten, terbentuk dari tradisi selama beribu-ribu tahun sejarah dan terjaga oleh bahasa yang sama. Budaya Tiongkok juga terbentuk dari berbagai pemikiran dan nilai-nilai seperti Konfusianisme, Budha, Taoisme, dan sejumlah budaya lainnya. Konfusianisme sendiri merupakan pemikiran dan nilai-nilai yang paling berpengaruh yang membentuk fondasi dan dasar norma bagi perilaku interpersonal Tiongkok.

Sebagai salah satu dengan peradaban berkelanjutan terlama di dunia juga membuat tradisi Tiongkok untuk berevolusi, berkembang dan beradaptasi di dalam berbagai cabang ilmu-ilmu manusia seperti politik pemerintahan, ekonomi, pendidikan, seni, musik, literatur, arsitektur, militer, olahraga, makanan, dan kesehatan. Sifat keaslian dan keberlanjutan dari tradisi-tradisi ini merupakan bentuk keunikan dari Tiongkok itu sendiri di dunia. Tiongkok juga membawa dan menggunakan tradisi-tradisi dan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Salah satunya ada pada bidang politik. Beberapa konsep-konsep kunci yang digunakan dalam politik kontemporer Tiongkok bersumber dari masa lalu.

2.2.1.1 Konfusianisme

Konfusianisme merupakan suatu pemikiran yang memiliki peranan besar dalam membentuk identitas dan bagaimana Tiongkok secara keseluruhan berperilaku. Konfusius dengan argumen dan moral persepsinya berperan besar dalam membentuk Tiongkok, mulai dari bagaimana prinsip-prinsipnya memengaruhi pemerintahan. Konfusianisme dengan ide-ide mengenai kebajikan moral, pentingnya pemerintahan di dalam urusan manusia, dan terhadap prioritasnya mengenai stabilitas dan persatuan, yang mana dipengaruhi oleh pengalaman si pemikir selama hidupnya di masa peperangan, telah membentuk nilai-nilai fundamental dari peradaban Tiongkok.

Konfusius (551-479 Sebelum Masehi) merupakan seorang guru, penasihat, editor, filsuf, pembaru, dan nabi (Csikszentmihalyi, 2020). Konfusius lahir dan hidup pada masa Dinasti Zhou yang mana merupakan suatu era di mana Tiongkok

masih menggunakan sistem feodalisme di mana kekaisaran dibagi menjadi berbagai negara feodal di bawah pemerintahan pusat. Periode ini membawa banyak kesengsaraan dan kekacauan di mana rakyat harus menerima akibat dari konflik (Yao & Yao, 2000).

Pada masa itu kemudian bermunculan pemikir-pemikir yang berusaha menemukan dan menawarkan ide-idenya untuk menyelesaikan konflik antar negara feodal tersebut. Konfusius adalah salah satunya, dan mungkin merupakan yang paling terkenal. Ajaran utama dari Konfusianisme meliputi lima sifat mulia yang berarti lima kebajikan. Kelima sifat tersebut adalah: (1) *Ren* (忍), artinya adalah cinta kasih yang universal. Cinta kasih tidak mementingkan diri, namun mementingkan orang lain; (2) *Yi* (意), artinya adalah kebenaran atau pribadi yang luhur; (3) *Li* (礼), artinya adalah kesusilaan, budi pekerti, rasa susila, dan sopan santun; (4) *Ci* (慈), artinya adalah kearifan, kebijaksanaan, dan pengertian; (5) *Xin* (信), artinya adalah kejujuran dan kepercayaan, atau rasa untuk dipercaya orang lain dan sanggup memegang janji serta menepatinya (Hartati, 2016). Selain kelima sifat tersebut, Konfusius juga memiliki aturan mengenai hubungan antar manusia. Peraturan tersebut terdapat di dalam prinsip *Wulun* (五伦) yang mana artinya adalah lima norma kesopanan di dalam masyarakat. Prinsip ini mengatur mengenai hubungan antara: (1) raja dan menteri atau atasan dan bawahan, (2) seorang ayah dengan anak laki-lakinya, (3) seorang suami dengan istrinya, (4) sesama saudara laki-laki, dan (5) antar sesama teman. Konfusianisme memberikan ajaran tentang bagaimana seharusnya menjadi manusia yang bermoral dan seorang pemimpin

harus bermoral, berperasaan, dan peka terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi dari rakyatnya. Nilai-nilai Konfusianisme mengakar sangat kuat dalam peradaban Tiongkok (Hartati, 2016).

Kemudian bagaimana Konfusianisme berperan di dunia modern dapat dilihat dari perkara negara dan pendidikan. Konfusianisme memiliki pengaruh yang nyata terhadap politik domestik dan politik luar negeri Tiongkok. Negara selalu di pandang sebagai perwujudan dan pelindung bagi peradaban Tiongkok. Oleh karena itu baik di era dinasti atau era komunis, negara memiliki legitimasi dan otoritas yang besar. Partai Komunis Tiongkok menggunakan Konfusianisme untuk meningkatkan sentimen nasional di antara masyarakatnya. Konfusianisme berperan sebagai legitimasi bagi kepemimpinan Partai Komunis dan untuk meningkatkan kebijakan luar negeri yang tegas (Zhao, 2018). Filosofi Konfusian merupakan pilihan logis bagi elit-elit politik Tiongkok karena sifatnya yang mengakar kuat di dalam sejarah Tiongkok dan memberikan legitimasi kuat terhadap kepemimpinan pemerintah. Sebagai contohnya, Presiden Xi Jinping sering menyebutkan Konfusianisme di dalam pidato-pidato publiknya dan memuji budaya tradisional Tiongkok (Kai, 2014). Xi Jinping di sini bermaksud untuk menekankan relevansi Konfusianisme dengan budaya Tiongkok yang tidak terganggu. Tiongkok juga menunjukkan keterikatannya dengan Konfusianisme dengan Confucius Institutes (CI) yang mana merupakan inisiatif pemerintah Tiongkok untuk mempromosikan bahasa Tiongkok dan budayanya secara internasional. CI beroperasi dan terletak di berbagai belahan dunia, dan meskipun bersifat edukasi, CI juga merepresentasikan perubahan politik di dalam hubungan Tiongkok dengan negara-negara lainnya

(Hoare-vance, 2009). Selain itu, Konfusianisme juga memberikan penekanan terhadap harmoni yang mana digunakan sebagai ide-ide untuk menjaga stabilitas politik domestik dan global oleh pemerintah Tiongkok. Konfusianisme juga memandang hierarki sebagai bentuk ideal di dalam Hubungan Internasional. Hal ini menjelaskan ketegasan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sebagai bentuk untuk menjaga kestabilan hierarki tersebut dan bentuk reaksi Tiongkok terhadap negara-negara lain yang dianggap terlalu agresif (Šimalčik, 2016).

2.2.1.2 Bahasa

Bahasa Tiongkok merupakan bahasa yang hidup dan kuno di saat yang sama. Bahasa Tiongkok merupakan produk dari budaya dan sejarah yang panjang. Ketika sistem penulisan Tiongkok pertama kali yang berkembang pada masa Dinasti Shang, tepatnya pada milenium kedua sebelum masehi, Mesir kuno tengah pada masa kejayaannya, negara-kota besar Yunani klasik belum muncul, dan Roma masih seribu tahun lagi sebelum terbentuk (Kissinger, 2011). Tetapi, sistem penulisan pada masa Dinasti Shang hingga saat ini masih digunakan oleh lebih dari satu miliar orang. Tiongkok pada masa sekarang dapat memahami tulisan yang bersumber pada masa Konfusius. Bahasa Tiongkok merupakan sumber utama dari peninggalan sejarah yang luas dari Tiongkok dan memiliki lebih banyak pengguna jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Inggris merupakan bahasa dengan jumlah total pengguna yang paling banyak di dunia, tapi ketika berbicara mengenai pengguna asli maka bahasa Tiongkok merupakan yang terbanyak (Ghosh, 2020).

Tabel 1. Jumlah pengguna asli bahasa-bahasa di dunia

Rank	Bahasa	Pengguna Asli	Asal Bahasa
1.	Tiongkok Mandarin	918 juta	Sino-Tibetan
2.	Spanyol	460 juta	Indo-Eropa
3.	Inggris	379 juta	Indo-Eropa
4.	Hindi	341 juta	Indo-Eropa
5.	Bengali	228 juta	Indo-Eropa
6.	Portugis	221 juta	Indo-Eropa
7.	Rusia	154 juta	Indo-Eropa
8.	Jepang	128 juta	Jepang
9.	Punjabi Barat	93 juta	Indo-Eropa
10.	Marathi	83 juta	Indo-Eropa

Sumber: (Ghosh, 2020)

Jumlah pengguna total bahasa inggris mencapai lebih dari 1,1 miliar dan bahasa Tiongkok berada pada posisi kedua. Tetapi, ketika berbicara mengenai jumlah pengguna aslinya, bahasa Tiongkok adalah yang terbanyak dengan 918 juta pengguna yang mana jumlahnya hampir 2,5 kali dari pengguna asli bahasa inggris.

Pengaruhnya akan terus bertumbuh seiring dengan peningkatan keterlibatan Tiongkok dengan dunia luar. Persebaran Institusi Konfusian ke seluruh dunia yang cepat menunjukkan bahwa bahasa Tiongkok telah menjadi sumber utama dari *soft power* Tiongkok.

Dalam proses pembangunan negara Tiongkok, bahasa Tiongkok beradaptasi seiring dengan terjadinya perubahan. Bahasa Tiongkok ini merupakan bahasa yang ditarik dari berbagai elemen budaya dan bahasa sehingga telah banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah karakternya yang disederhanakan, adopsi bahasa daerah modern, dan penerapan sistem fonetis Latin. Semua hal tersebut menjadi fasilitas untuk pembelajaran dan penggunaan bahasa Tiongkok. Sumber ilmu pengetahuan dari luar Tiongkok sekarang dapat diterjemahkan dan bahasa Tiongkok kini sesuai dan cocok dengan proses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang cepat.

2.2.1.3 Masyarakat

Masyarakat tradisional Tiongkok didasarkan kepada keluarga dan kekerabatan, dan leluhurnya sebagian besar merupakan “petani” yang bergerak pada bidang agrikultural di mana keluarga dan kekerabatan tersebut memainkan peranan penting (Zhang, 2012). Berbeda dengan masyarakat barat yang bersifat individual. Di dalam kasus ini, Tiongkok dan Barat memiliki tipe masyarakat yang berbeda. Kontras dengan masyarakat Barat, Tiongkok jauh lebih menaruh perhatian terhadap keluarga dan berorientasi kepada kelompok. Struktur masyarakat semacam ini kemudian membentuk seperangkat norma dan hubungan yang mana

terefleksikan di dalam cara hidup Tiongkok. Terdapat nilai-nilai umum di Tiongkok seperti *sheji weijia* (berkorban untuk keluarga) dan *baojia weiguo* (mempertahankan keluarga dan memelihara negara). Kedua nilai tersebut yang kemudian membentuk apa yang disebut sebagai *jiaguo tonggou* atau “keluarga dan negara adalah satu”, sesuai dengan apa yang terimpikasi di dalam karakter Tiongkok untuk kata “bangsa”. Kata “bangsa” di dalam bahasa Tiongkok terdiri dari dua karakter, yaitu “negara” dan “keluarga”. Nilai-nilai yang berlaku di Tiongkok ini bersumber dari ide-ide Konfusius. Kemudian dalam prosesnya membangun negara modern, nilai-nilai konfusian ini secara bertahap berevolusi menjadi perasaan kuat terhadap identitas masyarakat dengan kebangsaan Tiongkok.

Modernisasi yang cepat telah membuat struktur sosial Tiongkok mengalami transformasi yang cepat pula. Kebijakan untuk terbuka dengan dunia luar yang diterapkan oleh Tiongkok telah sukses membawa transformasi tidak hanya pada bidang ekonomi saja, namun juga mencapai level masyarakat Tiongkok (Faure, 2008). Gaya hidup masyarakat Tiongkok mengalami perubahan yang sangat pesat dan dinamis. Setiap orang dapat menikmati kebebasan individual yang lebih besar porsinya dibandingkan dengan masa lalu. Kehidupan masyarakat Tiongkok bertransformasi menjadi sesuatu yang bersifat dinamis dan lebih terbuka.

Meskipun dengan pada masa sekarang dan dengan adanya modernisasi membuat nilai-nilai tersebut tidak sekuat dulu, keluarga Tetap memegang peranan penting. Hal tersebut dapat terjadi karena nilai-nilai yang didapat dari budaya-budaya Tiongkok yang memberikan penjelasan tentang bagaimana interaksi sosial

diatur tetap stabil selama beberapa waktu yang panjang (Fan, 2000). Nilai-nilai tersebut hingga kini masih menyediakan dasar norma bagi perilaku interpersonal Tiongkok. Keluarga tetap menjadi inti dari keterikatan emosional masyarakat Tiongkok.

2.2.2 Sifat Alami Politik Tiongkok

Salah satu aspek yang membuat Tiongkok dapat disebut sebagai Negara Peradaban adalah dari sifat alami politiknya. Partai Komunis Tiongkok merupakan pusat dari kekuatan politik di Tiongkok, dan secara *de facto* partai ini di bawah oleh seorang *supreme leader* atau *peremptory arbiter* (contohnya adalah Mao Zedong dan Deng Xiaoping). Fungsi dari pemimpin merupakan bagian dari tatanan politik dari Tiongkok yang kompleks dan tidak bisa digunakan untuk menjelaskan atau sebagai konfirmasi terhadap totalitarian (Christiansen & Rai, 2014). Kepemimpinan Tiongkok di bawah kepemimpinan komunis diawali pada 1 Oktober 1949 dan diprakarsai oleh Mao Zedong. Sebelum masa ini, Tiongkok merupakan negara berbentuk kerajaan dalam kurun waktu yang relatif lama. Meskipun sekarang pun sistem Politik Tiongkok tidak hanya melulu terbatas didefinisikan berideologi Marksisme-Leninisme-Maoisme, namun juga tertanam dengan nilai-nilai Konfusian yang mana memang merupakan nilai-nilai utama pada masa lalu (Oksenberg, 2001). Tetapi, baik masa setelah kepemimpinan komunis maupun masa sebelumnya tetap memegang peranan penting untuk menjelaskan sifat alami dari politik Tiongkok. Karena pada dasarnya di setiap masa yang ada di Tiongkok tetap memiliki dan menerapkan sifat politik yang pada dasarnya sama.

Politik selalu dipandang sebagai sesuatu yang selalu berdampingan dengan pemerintahan, dengan sedikit keterlibatan dari orang-orang. Baik pada era dinasti yang erat dengan Konfusianisme maupun selama masa komunis, hal ini selalu nyata adanya. Meskipun pada era Mao secara rutin menggerakkan orang-orang untuk kampanye masal, sifat alami dari partisipasinya lebih kepada *top-down* daripada *bottom-up*. Sedangkan di dalam pandangan Konfusian, ketidakterlibatan orang-orang dari pemerintahan dianggap sebagai *virtue* positif, yang memperbolehkan petinggi pemerintahan untuk menerapkan dan mewujudkan tata susila dan nilai-nilai yang mana sudah mereka tanamkan (Jacques, 2009). Pada intinya, negara secara konsisten dipandang sebagai puncak dari masyarakat dan menikmati kedaulatan di atas segalanya. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Eropa di mana kekuatan pemerintahan berdasarkan sejarah selalu menjadi subjek atau sumber tantangan. Sebagai akibatnya pemerintahan diwajibkan untuk membagi kekuatannya dengan kelompok dan institusi yang lain. Di Tiongkok, kelompok-kelompok semacam ini antara tidak ada atau tidak dianggap. Kelompok-kelompok yang umumnya di Eropa menjadi penantang dari kekuasaan dipandang secara berbeda di Tiongkok. Mereka antara dianggap atau menganggap diri mereka berada di bawah atau merupakan bawahan dari pemerintahan. Ide mengenai sumber otoritas yang berbeda yang seharusnya ada dan berdampingan bersama dengan otoritas pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan.

Hanya terdapat dua institusi yang memiliki peran penting dalam perpolitikan Tiongkok, yaitu pemerintah dan keluarga. Pemerintah, selain sebagai

entitas tertinggi di negara, juga mejadi perumus kepentingan nasional. Kepentingan yang diterima adalah kepentingan universal. Kepentingan universal ini berasal dari nilai-nilai kesusilaan tertinggi, entah itu dari ajaran-ajaran Konfusian atau pada kelanjutannya berasal dari Marksisme-Leninisme-Maoisme. Kepentingan yang berasal dari pemerintah adalah yang paling utama. Keluarga, melalui pola hubungan orang tua dan anak, memiliki peranan penting dalam membentuk pola pikir masyarakat Tiongkok mengenai tatanan politik dan kesatuan yang menekankan akan pentingnya hierarki dan bagaimana menempatkan diri di dalam masyarakat (Jacques, 2009). Perpolitikan Tiongkok menekankan kepada pentingnya tatanan politik, kesatuan, dan stabilitas. Tiongkok menaruh perhatian terhadap stabilitas bersumber dari pengalaman perpecahan dan invasi yang dialaminya. Stabilitas politik sendiri adalah keteraturan aliran pertukaran politik (Ake, 1975).

2.3 Tiongkok menuju *Great Power*

Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa sekarang Tiongkok merupakan salah satu kekuatan besar dunia, baik itu secara ekonomi, militer, maupun politik (Dittmer, 2014). Tiongkok juga sudah mengakui dirinya sebagai negara yang berstatus kekuatan besar dunia ketika pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Barack Obama pada Juni 2013. Pada pertemuan tersebut Xi Jinping menyebutkan mengenai “tipe baru dari hubungan kekuatan besar dunia” yang dapat diambil dari “*Three-Point Proposal*” sebagai formula baru terutama bagi hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan secara umum kekuatan besar lainnya. Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia,

pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, memiliki kursi permanen di dalam Dewan Keamanan PBB, program luar angkasa berawak, persenjataan nuklir, dan sebagainya (Callahan, 2005). Sejak 20 puluh tahun terakhir Tiongkok telah berhasil menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2012 Tiongkok telah berhasil melampaui Amerika Serikat sebagai negara perdagangan terbesar di dunia yang mana sekaligus mengakhiri dominasi Amerika Serikat di dunia perdagangan internasional (Dittmer, 2014).

Sejak diterapkannya reformasi ekonomi dan berdasarkan pertumbuhan yang dialaminya, Tiongkok juga berhasil menunjukkan kemampuan ketenagakerjaan, kreatifitas, dan kemampuan membeli, komitmen terhadap pertumbuhan, dan derajat kohesi nasionalnya. Kebangkitan Tiongkok dalam berbagai aspek seperti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat, perluasan pengaruh kekuatan militer, stabilitas politik, dan ketersediaan sumber daya menjadi sumber perdebatan komunitas internasional dan bahkan di dalam lingkup domestik Tiongkok itu sendiri. Sejak Deng Xiaoping menerapkan kebijakan untuk membuka diri dan mereformasi sistem ekonomi pada 1978, Tiongkok berhasil mencapai rata-rata 9,4 persen pertumbuhan PDB yang mana merupakan salah satu rata-rata pertumbuhan terbesar di dunia (Bijian, 2005). Pada masa-masa awal pembukaan diri dan reformasi ekonomi, total nilai perdagangan Tiongkok hanya mencapai 20,6 miliar dolar, berada pada urutan ke 32 di antara negara-negara pedagang lainnya. Aspek militer Tiongkok pun mengalami peningkatan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dialaminya. Anggaran militer Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan, dari 30 miliar dolar pada tahun 2000 hingga mencapai 120 miliar

dolar pada tahun 2010 yang mana merupakan kedua tertinggi setelah Amerika Serikat (Dittmer, 2014).

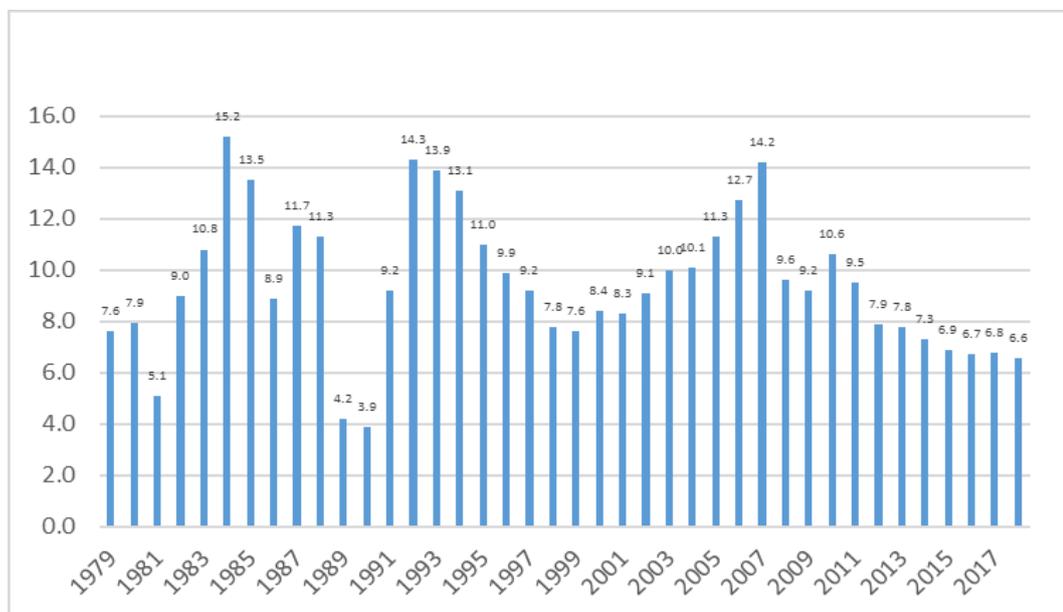
Lalu, sesungguhnya bagaimana Tiongkok sebagai salah satu kekuatan besar dunia? Tiongkok telah memposisikan dirinya sebagai aktor global dengan peran dan kapasitasnya terhadap negara-negara lainnya. Kini kehadiran Tiongkok dapat dirasakan di berbagai belahan dunia, mulai dari Asia Pasifik Selatan, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, Amerika Latin, dan sebagainya (Chhabra, Doshi, Hass, & Kimball, 2020). Kekuatan politik Tiongkok juga berkembang dan terlibat di berbagai belahan dunia, dari Greenland dan Karibia hingga Peru dan Argentina, dari Afrika Selatan dan Zimbabwe hingga Pakistan dan Mongolia (Simpson, 2020). Tiongkok merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, dan berada pada jalur untuk mengalahkan Amerika Serikat. Tiongkok dilihat dari kapabilitas militer konvensional merupakan yang terbesar di dunia, memegang kursi permanen di Dewan Keamanan PBB sejak 1971 yang mana menunjukkan besarnya perannya di sistem Internasional, menjadi partner perdagangan penting bagi berbagai negara, dan menjadi destinasi terbesar untuk *Foreign Direct Investment* (FDI) (Oneal, 2007).

2.3.1 Kapabilitas Ekonomi

Tiongkok muncul dari yang sebelumnya terisolasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia kurang dari 70 tahun (Harrison & Palumbo, 2019). Sejak kebijakan membuka diri dan reformasi ekonomi, Produk Domestik

Bruto (PDB) Tiongkok mencapai rata-rata 10 persen setiap tahunnya, dan lebih dari 850 juta orang telah berhasil dikeluarkan dari status kemiskinan (Worldbank, n.d.). Pertumbuhan PDB Tiongkok pada periode 1990 sampai dengan 2001 bahkan lebih impresif yang mana mencapai empat kali dari rata-rata dunia. Tiongkok dengan mudah berhasil menjadi peringkat pertama dalam pertumbuhan ekonomi secara global, dengan pesaing paling dekat adalah Singapura.

Gambar 1. Pertumbuhan tahunan PDB Tiongkok 1979-2018



Sumber: (Morrison, 2019)

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok merupakan yang terbesar di antara negara-negara yang lainnya dan merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat (Lotta, 2009). Tiongkok terlibat cukup dalam dengan perkonomian dunia. Negara ini merupakan pemegang dolar Amerika Serikat terbesar di dunia dan terlibat dengan persaingan untuk bahan mentah dan energi di Afrika dan

berbagai daerah lainnya. Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi yang sifatnya agresif. Jika dilihat dari sisi yang lain, Tiongkok merupakan yang terbesar di dunia dalam hal perekonomian dari segi keseimbangan kemampuan berbelanja, pabrik, *merchandise trader*, dan pemegang cadangan devisa. Perdagangan Tiongkok mengalami ledakan, dari yang awalnya hanya berjumlah beberapa juta dolar pada 1950 menjadi 20 miliar dolar pada akhir 1970 dan 510 miliar dolar pada 2001 (Kim, 2003).

Tabel 2. Perbandingan pertumbuhan PDB Tiongkok dengan negara-negara di dunia 1990-2019

Negara	Persentasi Tingkat Pertumbuhan Tahunan
	Rata-rata
Tiongkok	9,34 persen
India	6,23 persen
Singapura	5,82 persen
Korea Selatan	5,17 persen
Indonesia	4,94 persen
Amerika Serikat	2,48 persen
Jerman	1,62 persen
Perancis	1,61persen
Jepang	1,1 persen
Rusia	0,82 persen

Sumber: (World Development Indicator, n.d)

Yang menjadi salah satu alasan kebangkitan ekonomi Tiongkok adalah dengan begitu banyaknya pabrik yang membuat berbagai macam hal dari mainan hingga telepon pintar untuk konsumen-konsumen di seluruh dunia (Lee, 2019). Masuknya Tiongkok ke World Trade Organization (WTO) pada 2001 juga membantu memperkuat statusnya sebagai pabrik dunia dan pedagang terbesar. Penghalang perdagangan dan tariff diturunkan dan sejak itu pula barang-barang Tiongkok berada di seluruh dunia (Harrison & Palumbo, 2019). Tiongkok juga merupakan destinasi ekspor terbesar bagi 33 negara dan sumber terbesar impor bagi 65 negara. Selain dari sektor perdagangan, Tiongkok juga bertumbuh setiap tahunnya menjadi pemain besar dalam aliran investasi global. Dari 2015 sampai 2017, Tiongkok merupakan terbesar kedua bagi *Foreign Direct Investment (FDI)* keluar dan terbesar kedua bagi FDI yang masuk. Tiongkok sebagai pemain besar dalam hal FDI ini juga tidak lepas dari reformasi ekonomi kebijakan Deng Xiaoping. Tiongkok mulai menjadi target menjanjikan bagi FDI mulai pada tahun 1990an di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan dari 11 miliar dolar pada 2001 hingga 40,7 miliar dolar pada 2000 (Kim, 2003).

Meskipun pertumbuhan ekonominya sekarang berada kisaran lima persen hingga enam persen, negara yang satu ini tetap akan menjadi mesin terkuat dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Tiongkok juga mengincar untuk menjadi garda terdepan dalam pengembangan ekonomi global dengan gelombang pendanaan proyek infrastruktur global yang dinamakan *the Belt and Road Initiative (BRI)*. BRI menggunakan apa yang disebut sebagai jalur sutra yang baru dengan tujuan untuk menghubungkan sebagian wilayah di dunia dan seperlima dari PDB global,

mengatur jaringan perdagangan dan investasi yang melebar ke seluruh dunia (Harrison & Palumbo, 2019).

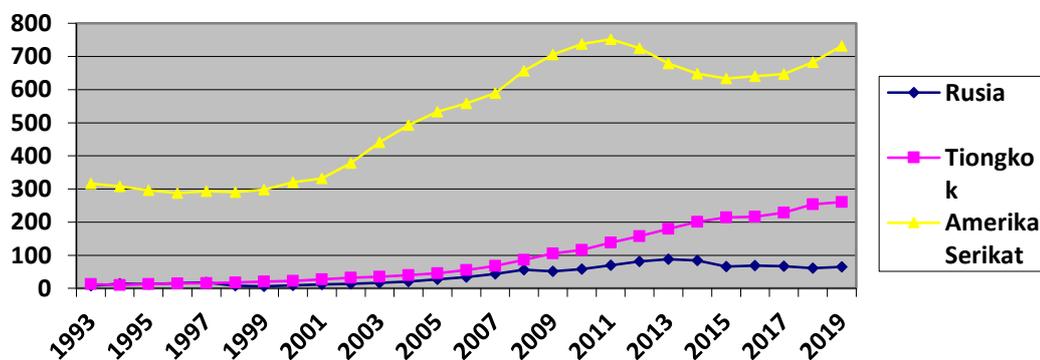
2.3.2 Kekuatan Militer

Kekuatan militer juga menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat bagaimana sebuah negara dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan besar dunia. Pemerintahan Tiongkok tengah bekerja untuk membuat kekuatan militer negaranya semakin kuat, efisien dan lebih maju secara teknologi untuk menjadi kekuatan tingkat atas dalam tiga puluh tahun (Maizland, 2020). Dengan meningkatnya anggaran militernya secara bertahap setiap dekadennya, People's Liberation Army (PLA) telah menjadi salah satu yang terdepan dalam bidang kemiliteran yang mana termasuk di dalamnya kecerdasan buatan dan kapal anti rudal balistik. Selama tahun-tahun yang telah lewat, Tiongkok tengah berada pada fase modernisasi yang cepat pada kemiliterannya dengan meningkatkan kemampuan persenjataannya, membangun industri yang lebih efisien, dan melancarkan program luar angkasa (Chen & Feffer, 2009). Tiongkok mengambil langkah untuk mengembangkan perangkat keras militernya sekaligus dari sisi sumber daya manusianya, disokong dengan industri militer yang lebih kuat. Menurut Institute for Strategic Studies (IISS) di London anggaran militer Tiongkok pada 2001 mencapai 46 miliar dolar yang mana 2,6 kali lebih banyak dari publikasi resminya dan menurut Stockholm International Peace Research Institute's (SIPRI) memperkirakan anggarannya pada tahun yang sama mencapai 27 miliar dolar, 1,6 kali lebih banyak dari publikasi resmi (Kim, 2003). Kemudian secara berurutan, berdasarkan publikasi resmi pemerintahan Tiongkok, anggaran militer Tiongkok pada 2007 adalah 42,635

miliar dolar, 2008 adalah 61,185 miliar dolar, dan pada 2009 70,3 miliar dolar (Chen & Feffer, 2009). Tiongkok setiap tahunnya selalu meningkatkan anggaran militernya.

Grafik 1. Anggaran militer Tiongkok dari 1993-2019 dalam dolar Amerika Serikat

(perbandingan dengan Amerika Serikat dan Rusia)



Sumber: (World Development Indicator, n.d)

Salah satu titik baliknya terjadi pada sekitar 1990an ketika Tiongkok menyaksikan demonstrasi dari kekuatan militer Amerika Serikat ketika perang teluk dan krisis teluk Taiwan (Maizland, 2020). Terkejut dengan canggihnya militer Amerika Serikat, pemerintahan Tiongkok mengakui bahwa negaranya kekurangan teknologi untuk menjalani perang modern dan mencegah kekuatan asing yang berniat mengintervensi urusan regionalnya. Pemerintahan Tiongkok setelah itu berusaha untuk meningkatkan anggaran pertahanan, berinvestasi pada persenjataan, dan menerapkan program untuk memacu industri Tiongkok. Senada dengan apa yang dikatan oleh Samuel Kim (2003) yang mengatakan bahwa Perang Teluk pada 1991 dan Perang Kosovo pada 1999 menunjukkan bahwa tentara Tiongkok tidak

terlatih dan terlengkapi dengan senjata modern dan berteknologi tinggi. Untuk Titik balik lainnya terjadi pada 2012, ketika Xi Jinping mulai memegang kekuasaan. Melalui visinya “*China Dream*”, Xi Jinping mendorong militer Tiongkok untuk bergerak lebih lagi dari masa pemimpin sebelumnya. Kemudian pada 2017, Xi Jinping membuat dua tujuan utama untuk PLA: (1) menyelesaikan modernisasi pada 2035 dan (2) dapat menjadi *world-class force* pada pertengahan abad, kemungkinan pada 2049 (Stashwick, 2020).

Kekuatan militer Tiongkok, menurut laporan dari Codesman, Burke, dan Molot (2019), belum pada tingkatan untuk bersaing dengan Amerika Serikat dan Rusia. Tetapi, jika mempertimbangkan kemampuan untuk berkembang dan menyebarkan pasukan militernya, Rusia memiliki ekonomi dan kemampuan untuk membiayai pasukan militer yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Tiongkok. Antara 2030 hingga 2040 Tiongkok diperkirakan akan menyeimbangi Amerika Serikat dalam hal pengeluaran militer. Tiongkok sudah dapat menyaingi Rusia dan Amerika Serikat dalam berbagai area dari kekuatan konvensional dan jumlah persenjataan, walaupun masih tertinggal dalam hal kapabilitas teknologi dan sistemnya. Sebelumnya para analis pertahanan Rusia yakin bahwa negara ini dapat mempertahankan superioritas militer terhadap Tiongkok, tapi perkembangan kapabilitas pertahanan Tiongkok yang dikombinasikan dengan diplomasinya yang lebih agresif mengubah keyakinan tersebut (Richard, 2012)

Titik-titik balik tersebut jika dirangkum maka hasilnya mengatakan bahwa peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut konsisten dengan tujuan kepemimpinan Tiongkok untuk membangun kekuatan nasional

komprehensif (Chen & Feffer, 2009). Pemerintahan Tiongkok percaya bahwa dalam usahanya untuk mencapai status kekuatan besar dunia maka Tiongkok sebelumnya harus menjamin lingkungan internasional yang kondusif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pada bidang militer ini merupakan usaha Tiongkok untuk menjamin keamanan domestiknya dan integritas nasionalnya. Tiongkok ingin mengatakan kepada dunia bahwa meskipun dengan peningkatan aktivitas militernya bukan berarti negara ini akan mengancam negara-negara yang lainnya. Selain itu, urgensi Tiongkok untuk terus meningkatkan militernya terkait dengan akses terhadap pasar dan sumber daya alam yang menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk mengamankan hal tersebut maka Tiongkok merasa penting untuk menjaga jalur laut yang vital bagi impornya. Jika dilihat dari sudut pandang yang lain, usaha peningkatan kapabilitas militer Tiongkok terkait dengan konflik teritorial. Ketika Tiongkok memiliki militer yang kuat, maka klaim terhadap teritori akan berkesan lebih kuat. Konflik teritorial tersebut seperti apa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Tentu saja jika dibandingkan dengan kapabilitas ekonomi, militer Tiongkok terkesan tidak setingkat dengannya. Tetapi, tetap saja militer Tiongkok merupakan unsur kekuatan Tiongkok yang memiliki pengaruh besar di dunia yang mana terlihat dari bagaimana negara-negara lain meresponnya.

2.3.3 Stabilitas Politik, Wilayah dan Populasi, dan Sumber Daya

Stabilitas tentu saja merupakan istilah yang sifatnya relatif. Negara-negara yang stabil memiliki sesuatu yang sama, yaitu: mereka secara institusional mampu mengatasi setiap bentuk krisis dan menyerap dampaknya dari segala sumber, baik

secara internal maupun eksternal (Shiping, 2017). Sedangkan negara yang rapuh adalah negara-negara yang tidak mampu untuk menyediakan keamanan dasar, menjaga aturan hukum, atau menyediakan layanan dasar dan kesempatan ekonomi bagi rakyatnya. Selama empat dekade sejak Deng Xiaoping menerapkan kebijakan membuka diri dan reformasi ekonomi Tiongkok telah mengalami pertumbuhan dalam skala yang tidak tertandingi di dalam sejarah modern (Bardoloi, 2017). Partai Komunis Tiongkok terus menikmati legitimasi pada tingkatan yang tinggi yang mana merupakan dan akan selalu menjadi poin penting untuk menjadi perkembangan negara. Tiongkok menaruh perhatian yang besar terhadap stabilitas struktur politik dapat dilihat dari sejarahnya yang mengalami invasi dan kekacauan politik sebelum 1949 yang mana mempersulit ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk berkembang. Selain itu, populasi sejumlah 1,4 miliar jiwa juga menunjukkan bahwa stabilitas politik di Tiongkok akan menjadi lebih sulit. Sistem satu partai yang diterapkan Tiongkok menunjukkan bahwa hanya Partai Komunis Tiongkok yang dapat membentuk dan menjaga keteraturan politik (Zhusong, 2019). Tidak dapat dipungkiri, Tiongkok selama 20 tahun terakhir perekonomian Tiongkok memiliki performa yang bagus. Ketika memasukkan indikator ekonomi, maka stabilitas politik Tiongkok akan terlihat lebih baik (Shiping, 2017).

Untuk memahami Tiongkok, maka juga harus memperhatikan sejarah dan perjuangan yang dialami oleh negara ini. Bersarkan sejarah modernnya, Tiongkok mengalami banyak permasalahan dalam konteks pemerintahannya di mana selama abad ke-19 dan awal 20 negara ini harus terinvasi oleh negara lain. Tetapi, sejak saat itu juga pemerintahan Tiongkok telah mengalami perkembangan pesat di mana

pemerintahan Tiongkok berhasil menjaga kedaulatannya dan setelahnya menjaga rakyatnya dari eksploitasi dan opresi dari luar (Qingguo, 1996). Bukan merupakan perkara yang mudah untuk menjaga dan memerintah Tiongkok yang memiliki populasi besar. Pemerintahan memiliki tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya dan mengatasi krisis. Populasi dengan jumlah yang besar tentu saja akan mempersulit tugas ini.

Berbicara mengenai populasi, meskipun ekonomi dan militer seringkali mendapat perhatian lebih, demografi memainkan peranan yang penting dalam kompetisi jangka panjang antara kekuatan besar dunia (Eberstadt, 2019). Antara 1975 dan 2010, populasi usia kerja di Tiongkok (mereka yang berusia 15-64) hampir meningkat dua kali lipat, dan total jam kerja bahkan tumbuh lebih cepat. Tingkat kesehatan dan pendidikan juga meningkat dengan cepat pula. Selain itu, seperlima penduduk dunia tinggal di Tiongkok, yang mana mengindikasikan kepada sumber daya pasar dan produksinya. Dengan edukasi modern dan nilai-nilai kultural tradisional, populasi besar Tiongkok membeikan dampak yang besar di dunia. Perkembangan Tiongkok yang cepat di area-area seperti pariwisata, industri *automobile*, internet, kereta cepat, dan urbanisasi menunjukkan skala dampak yang besar tersebut (Zhang, 2012). Rakyat Tiongkok, dengan jumlah pekerja yang termotivasi berpindah ke perekonomian urban, telah menjadi salah satu rahasia dari kesuksesannya (Champion & Leung, 2018). Walaupun, dengan adanya kebijakan "one-child policy" yang diterapkan sebelumnya, sumber dari pertumbuhan tersebut akan secara perlahan hilang. Menurut proyeksi dari PBB,

populasi Tiongkok yang berjumlah 1,4 miliar jiwa akan berkurang, dimulai dari 2023.

Sebagai kekuatan besar dunia, teritori besar yang dimiliki Tiongkok juga memiliki dampak besar di mana negara ini menikmati keuntungan geopolitik dan geoekonomi (Zhang, 2012). Selama tiga dekade terakhir, Tiongkok telah menjalani kebijakan pintu terbuka dan menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara-negara ASEAN, membentuk Shanghai Cooperation Organization dengan Rusia dan Asia Tengah, dan mempromosikan integrasi ekonomi dengan Jepang dan Korea Selatan, juga dengan entitas lainnya seperti Hong Kong, Macau dan Taiwan. Sebagai efeknya Tiongkok dapat menjadi lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi regional dan pemulihan ekonomi global, dan hal ini tidak terpisahkan dari lokasi Tiongkok yang terletak di jantung Asia Timur yang mana merupakan wilayah paling dinamis bagi perkembangan.